

Penguatan Kompetensi SDM Desa dalam Tata Kelola Administrasi Digital di Desa Ponding–Ponding Kecamatan Tinangkung Utara

Trisno Wibowo K¹, Mulyana Saidi², Chrystanto Syaputra P¹, Naswa Putri Fauzia¹, Ni Putu Novria E S¹, Frigin Bubuli¹, Prendi Pangambil¹, Agung Pratama Djafar¹

¹AMIK Luwuk Banggai

²Politeknik Banggai Industri

INFO ARTIKEL

Diserahkan:

15/12/2025

Direvisi:

02/01/2026

Diterima

10/01/2026

Keywords:

Administrasi Desa,
Digitalisasi,
Pengabdian Kepada Masyarakat,
SDM Desa,
Pelayanan Publik.

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur Desa Ponding–Ponding Kecamatan Tinangkung Utara dalam pengelolaan administrasi desa berbasis digital. Metode pelaksanaan meliputi pelatihan berbasis praktik, pendampingan intensif, dan evaluasi kompetensi aparatur desa. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan kompetensi aparatur desa dengan rata-rata peningkatan sebesar 36%, khususnya pada kemampuan pengarsipan dan pengelolaan administrasi digital. Implementasi administrasi digital berdampak pada percepatan pelayanan publik, penataan data yang lebih tertib dan terstruktur, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Kegiatan ini memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat, serta memiliki potensi keberlanjutan melalui pendampingan lanjutan dan penguatan kebijakan internal desa dalam mendukung transformasi administrasi desa berbasis digital.

Corresponding author email: tkandakon@gmail.com



Published by Alesha Media Digital. This is an open access article under the [CC BY SA](#) license
Copyright@ Author (2026).

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan yang berperan langsung dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat [1],[2]. Tata kelola administrasi desa yang tertib, akuntabel, dan transparan menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan pemerintahan desa yang efektif serta mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan [3], [4]. Prinsip tata kelola pemerintahan yang kredibel menitikberatkan pada aspek transparansi sebagai fondasi utama dalam pengimplementasiannya [3]. Administrasi desa mencakup pengelolaan data kependudukan, surat-menyurat, keuangan, serta dokumentasi kegiatan pemerintahan yang harus dikelola secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan [5].

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh level pemerintahan, termasuk pemerintahan desa [6]. Transformasi digital dalam administrasi desa diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja aparatur, mempercepat pelayanan publik, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa [6], [7]. Digitalisasi administrasi juga menjadi strategi penting dalam memperbaiki kualitas layanan publik dan pengelolaan data desa secara terintegrasi [7], [8].

Namun demikian, implementasi administrasi digital di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala,

terutama keterbatasan kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparatur desa [8]. Rendahnya literasi digital, keterampilan penggunaan perangkat teknologi informasi, serta kebiasaan kerja yang masih berbasis manual menjadi faktor penghambat optimalisasi administrasi digital desa [8], [9]. Padahal, SDM merupakan faktor kunci keberhasilan dalam penerapan sistem administrasi berbasis teknologi [9].

Desa Ponding–Ponding Kecamatan Tinangkung Utara merupakan salah satu desa yang memiliki potensi sumber daya aparatur desa, namun belum sepenuhnya optimal dalam menerapkan tata kelola administrasi berbasis digital. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar proses administrasi masih dilakukan secara manual, pengarsipan dokumen belum tertata dengan baik, serta pemanfaatan teknologi informasi masih terbatas. Kondisi ini berdampak pada lambatnya pelayanan administrasi dan kurang optimalnya pengelolaan data desa [10].

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi SDM desa melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada penguatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola administrasi digital [10], [11]. Kegiatan pengabdian ini tidak hanya bertujuan meningkatkan keterampilan teknis aparatur desa, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya transformasi digital dalam mendukung pemerintahan desa yang profesional, transparan, dan akuntabel. Melalui pelatihan dan pendampingan yang terstruktur, diharapkan aparatur Desa Ponding–Ponding mampu mengelola administrasi desa secara digital dan berkelanjutan [11].

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini secara khusus bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur Desa Ponding–Ponding Kecamatan Tinangkung Utara dalam tata kelola administrasi desa berbasis digital. Tujuan kegiatan ini meliputi: (1) meningkatkan literasi dan keterampilan aparatur desa dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk administrasi desa, (2) mendorong penerapan sistem administrasi digital yang lebih tertib, efisien, transparan, dan akuntabel, serta (3) meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa melalui transformasi administrasi berbasis digital yang berkelanjutan.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi aparatur Desa Ponding–Ponding Kecamatan Tinangkung Utara dalam menerapkan tata kelola administrasi desa berbasis digital secara bertahap, partisipatif, dan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan mengintegrasikan peningkatan literasi digital, pelatihan teknis, serta pendampingan implementatif, sebagaimana direkomendasikan dalam berbagai kegiatan pengabdian berbasis digitalisasi administrasi desa di Indonesia [12], [13].

a. Tahap Persiapan dan Analisis Kebutuhan

Tahap persiapan diawali dengan koordinasi bersama pemerintah desa serta analisis kebutuhan (needs assessment) untuk memperoleh gambaran kondisi awal tata kelola administrasi desa. Kegiatan meliputi observasi sistem administrasi yang berjalan, identifikasi tingkat literasi digital aparatur desa, serta pemetaan kendala dalam pengelolaan administrasi desa. Analisis kebutuhan ini penting agar program pelatihan dan pendampingan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil aparatur desa [12].



Gambar 1. koordinasi bersama pemerintah desa serta analisis kebutuhan

b. Tahap Sosialisasi dan Peningkatan Pemahaman

Tahap sosialisasi bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai urgensi transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa. Metode yang digunakan adalah ceramah interaktif dan diskusi kelompok dengan materi mencakup konsep administrasi desa digital, manfaat digitalisasi terhadap kualitas pelayanan publik, serta peran aparatur desa dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pendekatan sosialisasi literasi digital ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran aparatur desa terhadap pemanfaatan teknologi informasi [12], [13].



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi dan Peningkatan Pemahaman

c. Tahap Pelatihan Teknis Administrasi Digital

Pelatihan teknis dilaksanakan menggunakan metode hands-on training dengan menekankan praktik langsung. Materi pelatihan meliputi digitalisasi surat-menyurat, pengarsipan dokumen elektronik, pengelolaan data administrasi desa berbasis digital, serta pemanfaatan aplikasi perkantoran untuk mendukung pelayanan administrasi. Model pelatihan berbasis praktik dinilai mampu meningkatkan keterampilan teknis aparatur desa secara signifikan dan aplikatif [13].



Gambar 3. Kegiatan Pelatihan Teknis

d. Tahap Pendampingan dan Implementasi

Tahap pendampingan dilakukan untuk memastikan hasil pelatihan dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam aktivitas administrasi desa. Pendampingan mencakup bimbingan teknis langsung, konsultasi pemecahan masalah, serta monitoring penerapan administrasi digital di kantor desa. Pendekatan pendampingan ini penting untuk meminimalkan resistensi perubahan dan memperkuat kapasitas aparatur desa dalam mengelola administrasi berbasis digital [14].



Gambar 4. Kegiatan Pendampingan dan Implementasi

e. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan pengabdian melalui pengukuran peningkatan pemahaman dan keterampilan aparatur desa, observasi perubahan sistem administrasi dari manual ke digital, serta pengumpulan umpan balik dari peserta. Hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan rekomendasi tindak lanjut agar penerapan tata kelola administrasi digital di Desa Ponding–Ponding dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan [12], [14].



Gambar 5. Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Kegiatan

3. HASIL & PEMBAHASAN

3.1 Hasil Kegiatan

a. Hasil Evaluasi Kuantitatif Peningkatan Kompetensi Aparatur Desa

Untuk mengukur efektivitas kegiatan pengabdian, dilakukan evaluasi terhadap kompetensi aparatur desa sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui observasi, penilaian praktik, dan kuesioner sederhana yang mencakup aspek literasi digital, keterampilan administrasi digital, dan pemahaman tata kelola administrasi desa. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada seluruh indikator kompetensi aparatur desa. Secara umum, tingkat pemahaman dan keterampilan aparatur desa mengalami peningkatan rata-rata sebesar 35–45% setelah mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan dan pendampingan.

Tabel 1. Peningkatan Kompetensi Aparatur Desa Sebelum dan Sesudah Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Sebelum Kegiatan (%)	Sesudah Kegiatan (%)	Peningkatan (%)
1	Pemahaman konsep administrasi desa digital	45	82	+37
2	Kemampuan menggunakan perangkat TI (komputer/aplikasi)	50	85	+35
3	Keterampilan pengelolaan surat-menyurat digital	42	80	+38
4	Keterampilan pengarsipan dokumen digital	40	78	+38
5	Pemahaman prinsip transparansi & akuntabilitas	55	88	+33
Rata-rata		46,4	82,6	+36,2

b. Evaluasi Dampak terhadap Sistem Administrasi Desa

Selain peningkatan kompetensi SDM, evaluasi juga dilakukan terhadap perubahan sistem administrasi desa. Hasil observasi menunjukkan adanya pergeseran dari sistem manual ke sistem digital pada beberapa aspek administrasi utama.

Tabel 2. Evaluasi Perubahan Sistem Administrasi Desa

No	Indikator Evaluasi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
1	Sistem surat-menyurat	Manual (arsip kertas)	Digital (dokumen elektronik)
2	Pengarsipan dokumen	Tidak terstruktur	Terstruktur & terklasifikasi
3	Waktu pelayanan administrasi	Relatif lama	Lebih cepat & efisien
4	Akses data administrasi	Terbatas	Mudah diakses
5	Transparansi administrasi	Rendah	Meningkat

c. Tingkat Kepuasan Peserta Kegiatan

Sebagai bagian dari evaluasi, dilakukan pula pengukuran tingkat kepuasan aparatur desa terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian.

Tabel 3. Tingkat Kepuasan Aparatur Desa terhadap Kegiatan Pengabdian

Aspek Penilaian	Persentase Kepuasan (%)
Kesesuaian materi dengan kebutuhan	90
Kejelasan penyampaian materi	88
Manfaat pelatihan bagi pekerjaan	92
Pendampingan dan bimbingan	95
Rata-rata Kepuasan	91,25

3.2 Pembahasan

Implementasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini membuktikan bahwa pengintegrasian instrumen digital dalam administrasi desa yang didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa mampu memberikan dampak nyata terhadap optimalisasi pelayanan publik di Desa Ponding–Ponding [15].

Pertama, hasil evaluasi pada Tabel 1 menunjukkan bahwa sebelum kegiatan, kompetensi aparatur desa masih berada pada kategori rendah hingga sedang, terutama pada aspek pengarsipan dan administrasi digital. Setelah kegiatan pengabdian dilaksanakan, seluruh indikator kompetensi mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan tertinggi terjadi pada aspek keterampilan pengelolaan administrasi digital, yang mengindikasikan bahwa metode pelatihan berbasis praktik (*hands-on training*) dan pendampingan intensif sangat efektif dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa. Temuan ini sejalan dengan hasil pengabdian yang dilakukan oleh Pratama et al. dan Rahmawati et al. yang menyatakan bahwa pelatihan berbasis praktik langsung mampu meningkatkan literasi dan keterampilan digital aparatur desa secara signifikan [16], [17].

Kedua, hasil evaluasi pada Tabel 2 menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian memberikan dampak nyata terhadap perbaikan sistem administrasi desa. Digitalisasi administrasi tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja aparatur desa, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Perubahan ini mempertegas temuan pengabdian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa penguatan literasi digital yang disertai dengan pendampingan berkelanjutan menjadi faktor kunci dalam mendorong transformasi tata kelola administrasi desa yang lebih efektif dan akuntabel [15], [18].

Ketiga, tingginya tingkat kepuasan peserta kegiatan menunjukkan bahwa program pengabdian telah dirancang sesuai dengan kebutuhan nyata aparatur desa. Pendampingan langsung memperoleh tingkat kepuasan tertinggi, yang menegaskan bahwa pendekatan pendampingan berkelanjutan memiliki peran strategis dalam penguatan kapasitas SDM desa. Hasil ini sejalan dengan temuan Gunawan et al. yang menekankan bahwa keberhasilan program pengabdian berbasis digitalisasi desa sangat ditentukan oleh intensitas pendampingan dan keterlibatan aktif peserta selama proses implementasi [18].

3.3 Dampak Sosial dan Perubahan Prilaku

Melalui pengamatan langsung pelatihan ini memberikan dampak yang cukup positif kepada pelayanan administrasi di desa, dari hasil wawancara diperoleh beberapa informasi seperti yang diutarakan beberapa aparat desa berikut : “Sebelum kegiatan ini, kami masih banyak bekerja secara manual, terutama dalam pengarsipan surat dan data administrasi. Setelah pelatihan, kami jadi lebih paham bagaimana menyimpan dan mengelola dokumen secara digital sehingga lebih cepat dicari dan tidak mudah hilang” (Narasumber 1). “Pelayanan kepada masyarakat sekarang terasa lebih cepat karena data sudah tersimpan rapi di komputer. Kalau ada warga yang membutuhkan surat, prosesnya tidak selama dulu karena datanya sudah ada” (Narasumber 2).

Selain peningkatan keterampilan teknis, aparat desa juga mengungkapkan adanya perubahan sikap dan pola pikir terhadap pemanfaatan teknologi informasi. “Awalnya kami ragu menggunakan sistem digital karena belum terbiasa, tapi setelah didampingi secara langsung, kami merasa lebih percaya diri dan terbantu dalam pekerjaan sehari-hari” (Narasumber 3).

3.4 Tantangan Dan Solusi Lanjutan

Tantangan utama dalam pelaksanaan PKM ini adalah perbedaan tingkat literasi digital aparat desa, keterbatasan sarana pendukung, serta kebiasaan kerja yang masih berbasis manual. Kondisi tersebut menyebabkan proses adaptasi terhadap administrasi digital belum berjalan optimal pada seluruh aparat desa. Selain itu, keterbatasan perangkat dan kestabilan jaringan internet juga menjadi kendala dalam penerapan sistem administrasi digital secara menyeluruh.

Sebagai solusi lanjutan, diperlukan pendampingan berkelanjutan dan pelatihan lanjutan secara periodik untuk memperkuat kompetensi aparat desa. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) administrasi digital serta dukungan anggaran desa untuk penguatan sarana teknologi informasi menjadi langkah strategis guna menjamin keberlanjutan transformasi administrasi desa berbasis digital.

3.5 Analisis

Analisis pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparat desa melalui pelatihan berbasis praktik dan pendampingan intensif berperan penting dalam mendorong transformasi tata kelola administrasi desa berbasis digital. Kegiatan PKM tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis aparat desa dalam pengelolaan administrasi dan pengarsipan digital, tetapi juga mendorong perubahan perilaku kerja menuju sistem yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Meskipun demikian, keberlanjutan implementasi administrasi digital masih menghadapi tantangan berupa perbedaan tingkat literasi digital dan keterbatasan sarana pendukung, sehingga diperlukan pendampingan lanjutan, penguatan kebijakan internal desa, serta dukungan anggaran untuk memastikan transformasi digital desa dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dalam penguatan tata kelola administrasi desa berbasis digital di Desa Ponding-Ponding telah berhasil meningkatkan kompetensi aparat desa dalam pengelolaan administrasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Pelatihan berbasis praktik yang disertai pendampingan intensif terbukti efektif dalam mendorong perubahan pola kerja dari sistem manual menuju administrasi digital yang lebih tertib, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain meningkatkan kualitas pelayanan publik, kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran aparat desa akan pentingnya transformasi digital dalam mendukung pemerintahan desa yang profesional. Meskipun masih terdapat tantangan terkait perbedaan literasi digital dan

keterbatasan sarana pendukung, hasil PKM ini menunjukkan potensi keberlanjutan yang kuat apabila didukung oleh pendampingan lanjutan, penguatan kebijakan internal desa, serta komitmen pemerintah desa dalam mengembangkan administrasi desa berbasis digital secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil dan pembahasan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

- a. Pertama, diperlukan pendampingan lanjutan secara berkelanjutan kepada aparatur desa guna memastikan penerapan administrasi digital dapat berjalan secara konsisten dan tidak kembali pada pola kerja manual. Pendampingan lanjutan juga penting untuk memperkuat adaptasi aparatur desa terhadap perkembangan teknologi informasi serta meminimalkan kesenjangan literasi digital antar aparatur.
- b. Kedua, penguatan sarana dan prasarana pendukung, seperti ketersediaan perangkat komputer, sistem pengarsipan digital, serta akses jaringan internet yang stabil, perlu menjadi perhatian pemerintah desa. Dukungan sarana yang memadai akan meningkatkan efektivitas penerapan administrasi digital dan memperkuat keberlanjutan program.
- c. Ketiga, disarankan adanya penyusunan standar operasional prosedur (SOP) administrasi desa berbasis digital sebagai pedoman kerja aparatur desa. SOP tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengelolaan administrasi yang tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus menjaga keberlanjutan transformasi digital di tingkat desa.

Saran-saran tersebut diharapkan dapat memperkuat dampak praktis kegiatan PKM serta menjadi rujukan bagi pengembangan program pengabdian serupa di desa lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan sivitas akademika AMIK Luwuk Banggai atas dukungan dan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Ponding–Ponding Kecamatan Tinangkung Utara beserta seluruh aparatur desa atas kerja sama, partisipasi, dan dukungan yang diberikan selama kegiatan berlangsung. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada editor dan reviewer dan editor Jurnal Masyarakat Madani Indonesia atas masukan dan saran konstruktif yang sangat membantu dalam penyempurnaan naskah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta, Indonesia, 2014.
- [2] A. Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada University Press, 2017.
- [3] Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, Indonesia: ANDI, 2018.
- [4] Andriyan, Y., Munzir, M., Sismar, A., Athirah, A. M., Hidayat, R., Henraman, H., & Sakti, D. A. B. (2024). Peningkatan Pengetahuan tentang E-Government dalam Pengembangan Desa Berbasis IT pada Kampung Fafanlap Kabupaten Raja Ampat. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 3(4), 447-455. <https://doi.org/10.59025/3xw7vk39>
- [5] Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta, Indonesia, 2016.
- [6] Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*. Jakarta, Indonesia, 2018.
- [7] Yusuf, M. J., & Fitryantica, A. (2024). Penerapan E-Government dalam Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Mantan Narapidana di Kepolisian Sektor. *Policies On Regulatory Reform Law*

- Journal*, 1(1), 1-15. <https://doi.org/10.59066/prlj.v1i1.820>
- [8] Sutari, I. A., Laia, F., & Rostina, C. F. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Sumber Daya Manusia, Pelatihan, dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Socfin Indonesia (SOCFINDO) Medan. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 4(2), 215-227. <https://doi.org/10.30596/maneggio.v4i2.7028>
- [9] E. Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Indonesia: Kencana Prenadamedia Group, 2019.
- [10] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Pedoman Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta, Indonesia, 2020.
- [11] Siregar, D. R. B., & Suryani, A. (2025). Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa melalui Pelatihan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi di Desa Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu. *Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(3), 273-279. <https://doi.org/10.63822/can3jr02>
- [12] E. Wahyunto, M. A. Taufiqi, N. Azizah, and N. S. Maryam, "Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Meningkatkan Administrasi Desa," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, vol. 3, no. 3, pp. 359–363, Mar. 2025. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i3.397>
- [13] A. Elok P. Maharani, J. Anom Husodo, S. Ummul Firdaus, et al., "Sosialisasi Literasi Digital Masyarakat Guna Optimalisasi E-Government di Kelurahan Hargobinangun, Sleman," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, vol. 4, no. 4, pp. 665–679, Sep. 2024. <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.2542>
- [14] Wibowo, T., Surdin, I., Permana, I. G. P. R., Saidi, M., Muawiyah, S., Wulandari, W., ... & Ma'adia, V. (2025). Penguatan Sarana Identitas Wilayah dan Penataan Lingkungan melalui Pembuatan Papan Nama dan Fasilitas Pengelolaan Sampah di Desa Nggawia Kecamatan Tojo Barat. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 4(4), 892-899. <https://doi.org/10.59025/hhc8bj76>
- [15] E. Wahyunto, M. Aulia Taufiqi, N. Azizah, and N. Siti Maryam, "Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Meningkatkan Administrasi Desa : Pengabdian Masyarakat", *JERKIN*, vol. 3, no. 3, pp. 359–363, Mar. 2025. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i3.397>
- [16] Deby Febriyan Eprilianto, Suci Megawati, Galih Wahyu Pradana, Yuyun Eka Kartika Sari, Mohamad Hermi Hibatulloh, Lisa Amelia Sari, ... Astrella Vanindya Sheren. (2025). Digitalisasi Administrasi dan Penguatan Literasi Digital sebagai Katalisator Pelayanan Publik yang Inovatif dan Berkelanjutan di Desa Beluk KeneK Kabupaten Sumenep. *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT INDONESIA*, 4(3), 25–42. <https://doi.org/10.55606/jpmi.v4i3.5813>
- [17] Irvan, M., Azhary, R. I., Destarini, D. D., & Zulkarnaen, I. (2025). Penguatan Tata Kelola Desa Digital Melalui Sosialisasi Desa.Id Bagi Perangkat Desa Kubangdeleg. *Jurnal Pintar Abdimas*, 3(2), 111–122. <https://doi.org/10.33603/jpas.v3i2.11127>
- [18] Izzalqurny, T. R. ., Rahmawati, A., & Ferdiansyah, R. A. (2024). Optimalisasi Tata Kelola Kependudukan pada Website di Desa Kebobang Sebagai Pengembangan Potensi Desa Menjadi Smart Village. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(4), 5643-5651. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i4.4620>